

# REFORMASI BIROKRASI

DP3ACSKB PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



TAHUN 2020



# Progres Reform (Before – After)



NO.	AREA PERUBAHAN	BEFORE	AFTER	KET
1.	Manajemen Perubahan	Belum terbentuk Tim RB, belum dibuat Rencana Kerja dan belum melakukan Monev	Tim RB sudah dibentuk, rencana kerja dan monev sudah dilaksanakan	
		Roadmap birokrasi belum disusun dan belum disosialisasikan	Roadmap birokrasi sudah disusun dan disosialisasikan	
		Belum ditunjuk Asesor Unit, belum membuat kertas kerja	Sudah ditunjuk Asesor Unit dan sudah membuat kertas kerja	
2.	Deregulasi Perundang-undangan	Belum dilakukan inventarisasi perundangan secara formal dan belum dilakukan harmonisasi	Sudah dibuat inventarisasi perundangan dan sudah dilakukan harmonisasi perundangan	
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	Sudah disusun evaluasi jabatan, namun belum dilakukan evaluasi kelembagaan	Sudah dilakukan evaluasi kelembagaan	
		Belum ada usulan perubahan organisasi	Sudah ada usulan perubahan organisasi	
4.	Penataan Tatalaksana	Sudah ada struktur organisasi, peta proses bisnis dan SOP, namun belum dilakukan evaluasi	Sudah dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis dan SOP	
		Sudah ada website, banner, papan pengumuman OPD, namun belum dilakukan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Sudah dilakukan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	

NO.	AREA PERUBAHAN	BEFORE	AFTER	KET
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	Sudah ada anjab OPD, evjab, SKP secara manual, monev aturan disiplin, namun belum ada SKP dan kepegawaian secara sistem	Sudah ada aplikasi e-tukin dan Sistem Informasi Kepegawaian	
6.	Penguatan Akuntabilitas	Sudah ada keterlibatan pimpinan terhadap penyusunan renstra, penetapan kinerja dan sudah dilakukan monev	Sudah ada keterlibatan pimpinan terhadap penyusunan renstra, penetapan kinerja dan sudah dilakukan monev	
		Sudah dilakukan upaya peningkatan kapasitas SDM dan dilakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala namun belum melalui aplikasi	Sudah ada aplikasi e-tukin	
7.	Penguatan Pengawasan	Belum ada banner anti korupsi, SK UPG, Peta Resiko OPD, sosialisasi WBS, monev penanganan benturan kepentingan	Sudah ada banner anti korupsi, Peta Resiko OPD, sosialisasi WBS, monev penanganan benturan kepentingan	
		Sudah ada Pakta Integritas, namun belum dibentuk Tim Zona Integritas	Sudah dibentuk Tim Zona Integritas	
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan	Belum ada kebijakan standar pelayanan, maklumat pelayanan, pelatihan budaya pelayanan prima	Sudah ada Pergub Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, dan Pelatihan <i>Capacity Building</i>	





# Implementasi RB terkait Pandemi COVID-19



No	Area Perubahan	Kebijakan	Implementasi			Ket
			Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	
1	Manajemen Perubahan	Pembinaan RB secara Online Pembinaan Agen Perubahana secara Online	-	-	-	
2	Deregulasi Perundang-undangan	Melakukan revisi dan harmonisasi Pergub terkait kinerja OPD	-	-	-	
3	Penataan Organisasi	Restrukturisasi Organisasi	-	-		
4	Penataan Tatalaksana	Memberikan informasi kepada publik terkait pelayanan secara online melalui media cetak & massa	Pengadministrasian Dukcapil	Pembinaan Kab/Kota terkait Kebijakan Administrasi Dukcapil	80.525.000	
5	Penataan SDM Aparatur	Melaksanakan bimtek bagi aparatur secara online	Pengadministrasian Dukcapil	Bimtek Peningkatan Kompetensi Aparatur Dukcapil	33.510.000	
6	Penguatan Akuntabilitas	Melakukan peningkatan kapasitas SDM organisasi perempuan secara online	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Pembinaan Organisasi Perempuan	158.721.000	
7	Penguatan Pengawasan	Perubahan/Pergeseran dokumen anggaran mendahului	Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peran Serta Anak dalam Pembangunan	375.406.500	
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan	Memberikan fasilitasi dan edukasi dalam penurunan kekerasan terhadap anak melalui webinar	Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Workshop Pencegahan Kenakalan dan Kekerasan terhadap Anak	222.475.000	